

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Dalam perkembangan studi keamanan internasional, posisi keamanan energi dinilai sangat krusial bagi kedaulatan suatu negara. Hal ini dikarenakan sumber energi seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara tidak hanya dianggap sebagai komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi domestik dan produk untuk pasar internasional, tetapi juga memiliki nilai strategis yang tinggi, seperti salah satu contohnya, minyak sebagai bahan strategis dijadikan sumber kekuatan dan pengaruh oleh negara dengan implikasi politik yang besar (MaXiojung 2005, Joseph S. Nye, 2007). Selain itu, urgensi kebijakan keamanan energi dalam suatu negara juga dianggap sama pentingnya dengan menjamin stabilitas negaranya, sebab selain berguna untuk memenuhi kebutuhan negara dan mempertahankan integritasnya (*defensive*), energi juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan negara (*offensive*) untuk melawan kekuatan yang lebih besar.

Masuknya isu energi dalam keamanan internasional bukanlah hal yang baru, ketahanan energi telah menjadi isu politik di awal abad ke-20 yang berhubungan dengan pasokan minyak untuk angkatan bersenjata (Yergin, 1991). Namun, terjadinya embargo minyak tahun 1973 telah menggarisbawahi isu keamanan energi ke dalam prioritas politik (Cherp Aleh, 2015). Melalui peristiwa embargo minyak oleh OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) pada tahun 1973, berdampak pada kekacauan ekonomi dan sosial di dunia, membuat isu keamanan energi semakin diperhatikan oleh negara. Sebagaimana

dalam perspektif *Copenhagen School of Security* (CSS), negara telah melihat bahwa terdapat ancaman lain selain ancaman militer yang mampu mengancam keamanan suatu negara. Maka dari itu, negara sebagai aktor realis wajib untuk melindungi wilayah dan kedaulatannya dari ancaman-ancaman tersebut.

Munculnya ancaman krisis energi yang masih terjadi saat ini membuat keamanan energi menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh negara karena isu keamanan energi memiliki sifat yang kompleks dan multidimensi (Pilloni Martina, 2022). Isu keamanan energi bersifat multidimensi diartikan bahwa konteks keamanan energi tidak hanya tentang kemudahan akses terhadap pasokan energi yang murah dan stabil serta terlindungi dari embargo dan manipulasi harga, namun lebih luas dari hal itu, yaitu berkaitan erat dengan tantangan politik lainnya seperti perubahan iklim, globalisasi dan dekarbonisasi energi. Sedangkan kompleksitas disini dapat dijelaskan bahwa sistem energi berkaitan dengan aspek sosial, teknologi, ekonomi, dan lingkungan (*domino effect*) sehingga masalah energi dapat berubah menjadi masalah keamanan.

Dalam jangka panjang, keamanan energi berfokus terhadap investasi energi untuk mengamankan pasokan energi (*supply*) berbasis terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan. Sebaliknya, dalam jangka pendek, keamanan energi merupakan kemampuan negara untuk memastikan ketahanan energi dalam menghadapi perubahan keseimbangan penawaran dan permintaan (Kocaslan, 2014). Bahkan, dalam kondisi terpenting untuk pembangunan negara yang stabil serta proporsional, salah satunya yaitu penyelesaian masalah intensitas produksi dan distribusi energi. Kegagalan negara dalam memenuhi konsumsi energi merupakan ancaman bagi ekonomi dan ketahanan nasional (Dźwigol et al., 2019).

Kemudian, esensi keamanan energi di era revolusi industri 4.0 saat ini telah menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh negara. Hal tersebut dikarenakan industri 4.0 (*cyber phsycal system*) menitikberatkan kolaborasi antara teknologi *cyber* dengan bidang industri atau biasa disebut dengan industri digital, sehingga pesatnya pertumbuhan dan tingginya penetrasi digitalisasi ini telah menyebabkan perubahan energi yang sangat besar. Manusia dan teknologi menjadi dua aspek yang saling terhubung, dan ketergantungan ini akan terus meningkat. Dari 3,5 miliar orang, atau hampir separuh populasi global, sekarang menggunakan internet (ITU, 2017).

Dalam kondisi transisi dari revolusi industri 4.0 ke industri 5.0, permintaan energi global juga diperkirakan akan meningkat sebesar 45% antara tahun 2015 sampai tahun 2030, dan hingga akhir abad ini, kebutuhan terhadap energi akan lebih dari 300%, yaitu tiga kali lebih banyak energi daripada yang dibutuhkan untuk investasi infrastruktur masa depan (Marilyn. A. and S. Benjamin. K. Brown, 2011). Dengan populasi global yang diperkirakan akan meningkat sekitar dua miliar selama dua dekade mendatang, disertai dengan peningkatan standar hidup, maka diperkirakan konsumsi listrik juga akan terus mengalami peningkatan sekitar 50% dari tahun 2021 hingga 2040, yaitu naik sekitar 2,5% pertahunnya (International Energi Agency, 2022).

Selain itu, setiap negara memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap energi seiring berjalannya waktu. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui perkiraan Badan Energi Internasional (IEA), permintaan energi global akan meningkat sebesar 45% pada tahun 2030, atau rata-rata 1,6% per tahun. Penggunaan teknologi yang berlebih memiliki efek, baik secara langsung ataupun

tidak langsung terhadap emisi energi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat diikuti oleh kenaikan populasi yang semakin meningkat, efisiensi energi menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh semua negara, termasuk negara-negara industri. Penggunaan energi sangat penting bagi sektor industri maupun kehidupan sehari-hari, seperti pemanasan ruangan, pendinginan atau penerangan.

Maka dari itu, dalam usaha untuk mengamankan ketahanan energi, dibutuhkan kerjasama melalui perdagangan energi (*energy trade*) berupa ekspor dan impor energi. Hal ini dilakukan didukung dengan fakta bahwa tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang memadai untuk mencukupi kebutuhan energi nasionalnya. Hubungan ketergantungan antara negara produsen dan konsumen energi yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan akan satu sama lain, yaitu konsumen dapat mencukupi keamanan pasokan (*supply*) sedangkan produsen dapat mencukupi keamanan permintaan (*demand*) (Willrich, 1945). Karena kurangnya sumber daya energi akan menyebabkan efek yang merugikan pada keamanan dan kemakmuran suatu negara, ketergantungan semakin tinggi terhadap energi atau terhadap negara importir akan menyebabkan kerentanan bagi negara yang secara alami tidak memiliki energi yang cukup (Keohane & Nye, 1977). Akibatnya, energi dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan politik negara pemasok, baik sebagai pelengkap atau pengganti kekuatan militer.

Wilayah Eropa sebagai salah satu kawasan industrial terbesar di dunia merupakan wilayah yang masih sangat bergantung pada impor energi terutama terhadap pasokan minyak bumi dan gas alam Rusia. Sejak 2013, anggota Uni Eropa merupakan pengimpor bersih energi, termasuk terhadap impor energi Rusia yang

menyumbang sekitar sepertiga kebutuhan energi wilayah di Eropa. Karena gas Rusia memiliki biaya produksi yang rendah, dan Gazprom (perusahaan energi multinasional milik Rusia) dapat menurunkan harga untuk mengalahkan hampir semua hal selain pasokan termurah dari Qatar dan hal ini tentunya menguntungkan konsumen Eropa. Ketergantungan Uni Eropa pada gas alam Rusia telah meningkat selama dekade terakhir mencapai 41,1% energi bruto yang tersedia berasal dari gas alam pada tahun 2020, menjadikannya bahan bakar dengan eksposur impor tertinggi dari Rusia. Bahkan pada tahun 2021, UE mengimpor lebih dari 40 persen dari total konsumsi gasnya, 27% dari impor minyak dan 46% impor batu bara dari Rusia (Eurostat, 2022).

Dari beberapa negara Eropa yang mengalami kerentanan energi, Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), Inggris adalah negara yang paling terpengaruh di Eropa Barat dalam hal daya beli rumah tangga, dengan penurunan sebesar 8,27% sehingga masyarakat Inggris harus memperhitungkan biaya dan sebagainya untuk sepanjang tahun 2022. Krisis ini sebagian karena ketergantungan Inggris pada impor gas. Pada tahun 2021, gas alam memenuhi 42% kebutuhan energi Inggris (UK Business Energy, 2023). Keterbatasan Inggris dalam produksi energi angin sebagai salah satu andalannya juga terhalang oleh musim dingin yang parah sepanjang tahun 2021 (Dalrymple, 2021).

Untuk memahami bagaimana struktur ketidakamanan energi di Inggris, maka perlu untuk meninjau apa saja indikasi ancaman terhadap keamanan energi tersebut. Pengukuran indeks ketahanan energi menurut National Energy Council menggunakan konsep 4A, yaitu *availability*, *accessibility*, *affordability*, *acceptability*. *Availability* berarti bahwa negara dapat menjamin ketersediaan

energi untuk masyarakat nasional. Dalam hal ini, Inggris yang merupakan negara yang memiliki kapasitas penyimpanan yang paling rendah di benua Eropa mengakibatkan negara tersebut sulit untuk menjamin kebutuhan energi nasionalnya di masa krisis energi. Bahkan, Belanda memiliki kapasitas lebih dari sembilan kali Inggris, sementara Jerman 16 kali lebih besar (Ambrose, 2021). Fasilitas penyimpanan Rough di Laut Utara, dimiliki oleh pemilik Gas Inggris Centrica, menyediakan 70% kapasitas penyimpanan gas Inggris selama lebih dari 30 tahun yang kemudian ditutup pada tahun 2017 menyusul keputusan pemerintah untuk tidak mensubsidi pemeliharaan yang mahal. Karena keterbatasan ini, saat ditengah-tengah terjadinya krisis energi, Inggris perlu mencari sumber energi lain termasuk sumber energi terbarukan untuk menghadapi musim dingin (*winterpeak*). Sedangkan *affordability* berarti keterjangkauan harga energi maupun daya beli energi. Harga energi gas dan listrik di Inggris dikatakan sangat tidak baik pada 2021 sampai 2023. Tarif harga listrik-gas Inggris naik sebesar 66,7% dan harga gas sebesar 129,4% dalam 12 bulan dari Maret 2022 hingga Februari 2023, dan hal tersebut merupakan beberapa pendorong utama tingkat inflasi tahunan (Office of National Statistic UK, 2023).

Accesability berarti bahwa negara dapat menjamin masyarakat untuk mengakses ke sektor energi. Dalam kasus Inggris, krisis keterjangkauan kepada energi gas, minyak dan batu bara adalah permasalahan umum yang terjadi, terutama di masa pandemi. Hal ini karena Inggris mengimpor sekitar 50% gasnya dari pasar internasional dan sebagian besar rumah di Inggris dan Wales dipanaskan oleh pasokan gas utama. Gas juga digunakan sebagai bahan bakar sekitar sepertiga dari pembangkit listrik di Inggris, sehingga kenaikan harga gas menyebabkan terjadinya

kenaikan harga listrik (Office of National Statistics, 2022). Maka, ketika kerentanan terjadi di pasar internasional, masyarakat sulit menjangkau kebutuhan energinya.

Acceptability bermakna bahwa negara dapat menjamin dampak negatif dari penggunaan energi serta meminimalisir efek buruk terhadap lingkungan sekitar. Sebagai pengimpor 50% gas alam yang termasuk sebagai fossil fuels yang dampaknya sangat merusak lingkungan dan penghasil CO₂ yang besar, dapat menimbulkan masalah lingkungan berupa hilangnya habitat, kebisingan dan polusi visual. Polusi udara merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar di Inggris dengan polutan luar ruangan diperkirakan berkontribusi terhadap 40.000 kematian dini berlebih per tahun, merugikan ekonomi Inggris hingga £20 miliar (US \$25 miliar) per tahun. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, Inggris menempati peringkat ke-27 dari 37 negara dengan tingkat PM_{2.5} tertinggi selama 2019 (IQAir UK, n.d).

Selain itu, terdapat juga beberapa factor yang menyebabkan krisis energi di Inggris. Menganalisis dari penyebab krisis energi Inggris dapat di uraikan menjadi 3 pemicu utama, antara lain (1) Brexit (2020), keputusan pemerintah Inggris untuk keluar dari Uni Eropa menurut hasil voting masyarakat lokal pada tahun 2016 menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan dalam beberapa sector di Inggris, termasuk sector energi. Setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara otomatis berdampak terhadap perubahan pasar energi negara tersebut, dimana Inggris tidak lagi bagian dari UE *Internal Energi Market* (UE IEM). Sehingga resminya Inggris keluar dari pasar Uni Eropa berdampak terhadap peningkatan biaya ekspor impor Inggris di Eropa, selain itu beberapa undang-undang tentang energi, serta system kelistrikan sudah tidak lagi terhubung (Ifelebuegu et al., 2017). Meskipun

kesepakatan dagang terus dilakukan oleh Inggris dan Uni Eropa, ketidakpastian hubungan antar keduanya tetap terasa. Dampak dari BREXIT ini semakin terasa pada saat COVID19 dan Perang Rusia-Ukraina dimana kerugian bisnis dan kurangnya tenaga kerja menjadi salah satu factor yang menjadi pemicu ketidakamanan energi nasional di Inggris.

Alasan utama Inggris keluar dari Uni Eropa salah satunya adalah ketidaksesuaian kebijakan *Open Door Immigration Policy* dan *free movement of person* yang termasuk di dalamnya juga menjamin konsep kewarganegaraan masyarakat UE, membuat imigran memiliki hak untuk bebas keluar masuk wilayah Eropa. Ketidakmampuan pemerintah lokal Inggris dalam mengontrol imigran serta semakin bertambah masuknya imigran Eropa ke Inggris telah memunculkan beberapa permasalahan *domestic*, seperti: masalah politik & ekonomi, masalah keamanan, perumahan dan Layanan Kesehatan Nasional. Sederhananya, kebijakan imigran ini memunculkan ancaman terhadap masyarakat sipil serta kerugian yang tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah Inggris (Dewa Gede Prastha Pratama Putra, n.d.).

Dampak penetapan pajak imigran dan perlakuan peningkatan perbatasan pasca Brexit juga telah menyebabkan sulitnya imigran untuk masuk ke dalam wilayah karena perlu melewati beberapa proses yang sangat ketat. Dalam masa ketidakamanan energi saat Perang Rusia-Ukraina, harga gas alam yang semakin mahal membuat negara Inggris harus beralih ke BBM sehingga perlu distribusi besar-besaran karena naiknya permintaan. bahan bakar mengalami gangguan karena kurangnya tenaga kerja imigran. Selain itu, *interconnectedness* Inggris dengan UE telah menyebabkan Inggris terpaksa mencari negara impor lain, seperti

Qatar, Nigeria, Norwegia dan Rusia sehingga hasilnya adalah Inggris menekan pasar energi internasional untuk produksi energi sehingga harga naik sebesar 500%, membuat 6 perusahaan kecil pensuplai bankrut (IESR, 2021).

(2) **Pandemi COVID19 (2019-2022)**, pada masa *global lockdown* tahun 2019 – 2022 telah menyebabkan penurunan harga dan produksi energi di dunia karena pembatasan aktivitas industri. Selain itu, masa pandemic CoronaVirus telah berdampak terhadap pergeseran dan perlambatan laju ekonomi global, kemudian proses ekspor-impor terganggu sehingga negara-negara pengimpor (OPEC) melakukan konferensi tingkat tinggi pada Maret 2020 dengan hasil putusan pengurangan produksi minyak 1,5 juta barel dan meminta negara-negara OPEC+ dan Rusia menaati keputusan tersebut. Ketika *New Normal* diberlakukan tahun 2021, permintaan energi global termasuk permintaan di Eropa mulai melonjak beriringan dengan persiapan masuknya musim dingin yang panjang. Pada masa pandemic COVID19 ini, sektor energi mengalami kebimbangan (*uncertainty*) disebabkan oleh beberapa factor, seperti (1) *oversupply production* ditengah-tengah ketidakstabilan kondisi mobilitas dunia sehingga menyebabkan harga BBM turun (2) konflik internal OPEC (3) pembatasan proses produksi dan aktivitas fisik dalam perusahaan karena CoronaVirus (Martin, 2022). Dalam kasus Inggris, COVID19 telah berdampak secara tidak langsung terhadap pasokan energi nasional karena dalam hal ini Inggris merupakan negara importir energi. Karena keterbatasan produksi dan distribusi dalam dan luar negeri saat COVID19, maka terjadi *panic buying* terhadap energi dalam masyarakat ketika pandemi selesai. Ambisi transisi energi Eropa saat COVID19 juga sulit untuk tercapai di masa pemulihan ekonomi

karena membutuhkan banyak dana sedangkan inflansi global sedang terjadi di negara-negara Eropa di masa krisis energi.

(3) **Perang Rusia-Ukraina** (2014 – saat ini), pemangkasan aliran gas *Nord Stream* yang dilakukan secara sepihak oleh Rusia menjadi faktor utama terjadi kerentanan energi di wilayah Eropa. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa efek riak krisis energi yang terjadi di Eropa di pengaruhi oleh dominasi impor energi dari Rusia dan dominasi tersebut menyebabkan ketergantungan energi di wilayah. Meskipun impor terus turun dari €148 miliar pada tahun 2011, kemerdekaan penuh dari Rusia tidak pernah dirumuskan sebagai target (Pinto, 2022). Hal tersebut terjadi karena selain Norwegia, Rusia merupakan satu-satunya negara yang terletak di benua Eropa dengan cadangan bahan bakar fosil yang cukup besar (Statista, 2020). Gas dan minyak adalah senjata Rusia untuk mempengaruhi Eropa, terutama di tengah terjadinya Perang Rusia-Ukraina. Bantuan yang diberikan negara-negara Uni Eropa ke Ukraina dan sanksi ekonomi Moskow yang diberikan kepada Rusia atas invasi yang dilakukan menyebabkan Rusia melakukan reaksi pemotongan aliran gas alam Nord Stream yang terhubung ke Eropa.

Dampak yang dihadapi Inggris sebagai salah satu negara importir gas alam Rusia pada saat konflik terjadi sangat berpengaruh terhadap keamanan nasional negara tersebut, termasuk keamanan ekonomi, politik, dan energi. Meskipun Inggris bergantung pada energi Rusia pada tingkat yang lebih rendah daripada negara-negara Eropa lain, namun, Inggris masih terkena gangguan di pasar energi akibat invasi Ukraina. Harga gas dan minyak telah meningkat tajam dan banyak negara Eropa mencari sumber lain energi. Krisis energi dampak dari pemotongan aliran gas Rusia ini telah menyebabkan Inggris harus melakukan banyak

rekonstruksi kebijakan ekonomi dan fiskal di luar skema Uni Eropa sehingga sangat menguras kas negaranya. Demonstrasi '*Great Britain Broken*' Protest (November 2022) dilakukan warga negara untuk menekan pemerintah dan elit politik agar segera menyelesaikan problematika krisis energi nasional, terutama mengenai problematika kenaikan harga listrik rumah tangga. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa ketidakamanan energi di Inggris menjadi masalah yang cukup serius dan dibutuhkan strategi khusus disertai kebijakan tegas untuk menjamin energi nasional terjamin beberapa tahun kedepan.

Dari 3 faktor pemicu krisis energi global tahun 2021-2023 pasca Brexit merupakan range waktu yang sangat kacau sehingga mengancam keamanan energi Inggris. Terhitung bahwa terdapat 3 pergantian Perdana Menteri Inggris dalam kurun waktu 4 tahun sejak berhasilnya referendum Brexit, yaitu Boris Jhonson, Lizz Truzz dan Rishi Sunak yang ketiganya memiliki respon berbeda terhadap krisis energi yang sedang dihadapi Inggris. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penulisan yang berjudul **“ANALISIS STRATEGI KEAMANAN ENERGI INGGRIS PASCA BREXIT DALAM MENGHADAPI FENOMENA KRISIS ENERGI GLOBAL TAHUN 2021-2023”**